



Pilkada Yogya Belum Usai

Kami memang memberikan ruang untuk keadilan, namun kami berharap ketika membuka kotak suara itu, harus ditunjukkan kesalahannya apa

YOGYA, TRIBUN - Tim pemenang pasangan calon (paslon) Wali Kota Yogyakarta nomor urut 1, Imam Priyono-Ahmad Fadli menduga adanya ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pilkada Kota Yogyakarta. Tim paslon nomor urut 1 ini mempertanyakan larangan pembukaan kotak suara pada saat rekapitulasi hasil Pilkada di beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Kami berupaya untuk membuka dugaan kecurangan yang ada. Salah satunya dari sampling, ada surat suara yang sebenarnya sah tapi dianggap tidak sah," ujar Ketua Tim Pemenangan Paslon IP-AF, Danang Rudyatmo dalam jumpa pers di DPC PDI Perjuangan Kota Yogya, Jumat (17/2).

Danang menegaskan upaya membuka kotak suara tidak sah yang jumlahnya ribuan adalah bagian dari proses mengawal hak konstitusi rakyat Yogyakarta yang sudah memberikan hak pilihnya pada pilkada Rabu, (15/2) lalu. Jadi, ujarnya, bukan semata menuntut hak atau mempertahankan posisi.

"Ada apa, proses rekapitulasi dengan permohonan

Pilkada Yogya Belum Usai
● Sambungan Hal 13

saksi di PPK mengingat jumlah suara tidak sah begitu besar tak bisa dibuka lagi. Kita ingin buka kotak suara, tapi Panwascam dan PPK tak abulkan, kita ingin pastikan hak konstitusi warga terkawal," ujarnya.

Pihaknya juga mempertanyakan langkah KPU Kota Yogyakarta yang mempublikasikan *real count*. Proses tersebut menunjukkan ada upaya membangun opini sebelum rekapitulasi manual sesuai tahapan selesai dilaksanakan.

Artes Surya, tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi, DPP PDI Perjuangan menjelaskan dengan jumlah surat suara tidak sah yang cukup besar mencapai sekitar 14.000 suara harus segera ditindaklanjuti. Keinginan membuka kotak suara, dilandasi adanya modus suara sah jadi tidak sah.

Dia juga mengklaim jika tidak ada kecurangan pasangan calon Imam Priyono-Ahmad Fadli pemilik suara terbanyak. Keberatan saksi yang memiliki mandat seharusnya juga dipenuhi, saksi yang memiliki mandat punya kewenangan adanya keberatan.

"Kalau tidak menindaklanjuti laporan saksi, ancaman pidana menunggu. Kita lihat dulu iktikad baik, setelah PPK masih ada di KPU," paparnya.

Menyayangkan
Tim pemenang pasangan calon nomor urut 2, Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi menyayangkan adanya tindakan pemaksaan pembukaan kotak suara di beberapa PPK saat rekapitulasi hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Yogyakarta. Pembukaan kotak suara itu tidak dilandasi dasar yang kuat.

Ketua SC tim pemenang HS-HP, Muhammad Sofyan menjelaskan, pihaknya mendapatkan laporan adanya upaya-upaya membuka kotak suara di 10 PPK yang sedang melaksanakan rekapitulasi. Dia menyebut, tiga PPK yang terpaksa harus membuka kotak suara ini berada di Umbulharjo, Ngampilan, dan Kotagede.

"Kami menyayangkan ada pembukaan kotak suara di tiga PPK tanpa dilandasi dengan dasar yang kuat. Padahal, tidak ditemukan di satu TPS manapun yang saksi menyatakan keberatan," ujar Sofyan dalam jumpa pers di posko pemenangan Omah Putih, Jumat (17/2).

Dia menambahkan, dalam rekapitulasi di 10 PPK terbukti tidak ada pergeseran suara. Kecuali, di PPK Kotagede di mana suara paslon 2 bertambah menjadi 1 suara. Dia menyoroti kejadian di PPK Umbulharjo di mana temuan suara sah yang dikategorikan tidak sah sudah terbukti tidak sah.

"Justru terbukti surat suara tidak sah karena dicoblos beberapa kali dan sobek, serta di berita acara telah ditandatangani KPFS, saksi seluruh paslon, panwas di TPS," katanya.

Insta

1.
2.

☐ Negatif ☐ Amat Segera
☐ Positif ☐ Sedera ☐ Untuk Ditanggapi
☐ Untuk Diketahui



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U 2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005